

**PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG
(663212)**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)
Jakabaring Palembang
Email : palembang@dilmil.org
Telpon : (0711)-5620579
Fax : (0711)-5620579**



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.05

DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang

Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579

E-mail : palembang@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 30 Juni 2026



Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Ckk NRP. 21950303390275

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab	7
Ringkasan	9
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. DASAR HUKUM	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-05 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ssituasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendaapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	46

C.6.	Beban yang Masih Harus Dibayar	47
C.7.	Ekuitas	48
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2.	Beban Pegawai	48
D.3.	Beban Persediaan	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa	49
D.5.	Beban Pemeliharaan	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	51
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	52
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	53
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional	55
D.13.	Pos Luar Biasa	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset.....	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	56
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	57
	Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.	57
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	57
E.4. 5	Koreksi Lain-lain	57
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	58
E.6.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	59
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	59

F.2. Pengungkapan Lain-lain	59
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	60
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang****Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579 E-mail : palembang@dilmil.org**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-05 Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-05 Palembang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer I-05 Palembang. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-05' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 21950303390275

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA. 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada SEMESTER I TA. 2026 adalah sebesar Rp. 105.445.000,- atau mencapai 39.18 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 251.288.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Semester I TA. 2026.

Nilai Aset Semester I TA. 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.489.000,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 6.489.000,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 7.740.000,- dan Rp. (1.251.000,-).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 120.679.900,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (120.679.900,-), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. (120.679.900).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp. (120.679.900,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 119.428.900,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. (1.251.000,-).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode Semester I TA. 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2026			TA 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	251.288.000	105.445.000	42	108.309.425
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		251.288.000	105.445.000	42	108.309.425

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG
NERACA
Semester I TA. 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	6.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	489.000	0
Jumlah Aset Lancar		6.489.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2. 4.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		6.489.000	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 1.	1.740.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	6.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		7.740.000	0

EKUITAS

Ekuitas	(1.251.000)	0
Jumlah Ekuitas	(1.251.000)	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.489.500	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

LAPORAN OPERASIONAL

Semester I TA. 2026 DAN 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	21.516.900	13.804.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	24.523.000	29.155.800
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	74.640.000	67.455.625
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		120.679.900	110.415.925
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(120.679.900)	(110.415.925)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D 12	0	0

Beban dari Kegiatan non operasional lainnya	D. 13	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 14		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(120.679.900)	110.415.925)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Semester I TA. 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
Ekuitas Awal	E. 1	0	287.000
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(120.679.900)	(110.415.925)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	119.428.900	108.309.425
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(1.251.000)	(2.106.500)
Ekuitas Akhir	E. 6	(1.251.000)	(1.819.500)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Visi Pengadilan Militer I-05 Palembang yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Militer I-05 Palembang Yang Agung "

Misi Pengadilan Militer I-05 Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer I-05 Palembang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Militer I-05 Palembang,
hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
 - Meningkatkan kualitas putusan hakim
 - Mempercepat penyelesaian perkara
 - Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
 - Pengawasan yang berkualitas
 - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
 - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas publik, hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
 - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk pelayananan Publik
 - Mengembangkan sistem informasi perkara

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dipelakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
 - Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksantuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan

Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan at as ATB dengan mas a manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	5
Franchise	10
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-05 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
BELANJA		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	280.110.000	251.288.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	105.445.000	105.445.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer I-05 Palembang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Semester I TA. 2026 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah SEMESTER I TA. 2026 sebesar Rp.0 atau 0 persen dibandingkan TA 2025. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Militer tidak memiliki PNBP.

Perbandingan realisasi PNBP SEMESTER I TA. 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP Semester I TA. 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	0	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0	0

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp.
105.445.000*

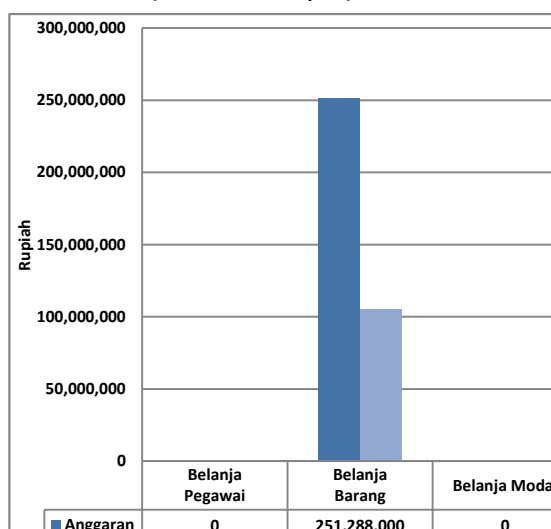
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer I-05 Palembang Semester I TA. 2026 adalah sebesar Rp 105.445.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 42 persen dari anggaran senilai Rp. 251.288.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada SEMESTER I TA. 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA. 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	251.288.000	105.445.000	42
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	251.288.000	105.445.000	42
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	251.288.000	105.445.000	42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA. 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) 2021

Realisasi Belanja Negara tahun anggaran 2026 mengalami sedikit penurunan yaitu 2,64% dibandingkan pada tahun anggaran 2025 yaitu masing-masing sebesar Rp. 105.445.000 dan 108.309.425 dari jumlah anggaran Rp. 251.228.000,- dan 276.470.000,- dalam persentase sebesar 42 persen dan 39 persen.

Perbandingan realisasi belanja SEMESTER I TA. 2026 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	105.445.000	108.309.425	(2.864.425)	(2,64)
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	105.445.000	108.309.425	(2.864.425)	(2,64)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer I-05 Palembang per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang :
Rp. 105.445.000*

Realisasi Belanja Barang PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG per 30 Juni TA. 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp. 105.445.000 dan Rp. 108.309.425 Realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2026 dan 2025 relatif sama jumlah dan persentasi terhadap anggarannya masing-masing.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja barang pengiriman surat dinas pos pusat	10.853.000	9.374.800	1.478.200	15,77
Belanja bahan	11.630.000	16.891.000	(5.261.000)	(31,15)
Belanja barang persediaan barang konsumsi	8.022.000	13.888.000	(5.866.000)	(42,24)
Belanja Jasa Profesi	0	0	0	0
Belanja Jasa Lainnya	300.000	700.000	(400.000)	(57,14)
Belanja perjalanan dinas dalam	0	0	0	0

kota				
Belanja perjalanan biasa	74.640.000	67.455.625	7.184.375	10,65
Belanja Keperluan Perkantoran	0	0	0	0
Belanja Honor Operasional	0	0	0	0
Satuan Kerja				
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Lainnya				
Belanja Langganan Listrik	0	0	0	0
Belanja Langganan Telepon	0	0	0	0
Belanja Langganan Air	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	105.445.000	108.309.425	2.864.425	2,65
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	105.445.000	108.309.425	2.864.425	2,65

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal :
Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer I-05 Palembang Semester I TA. 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp. 6.489.000*

Nilai Aset Lancar Semester I TA. 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.489.000,- dan Rp. 10.370.500,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer I-05 Palembang Semester I TA. 2026 dan 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar Semester I TA. 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.000.000	0
Persediaan	489.000	0
Jumlah Aset Lancar	6.489.000	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 6.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	TA 2025
1	Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
2	Uang tunai pada brangkas Bendahara	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	TA 2025
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 489.000*

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 489.000 dan Rp. 0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 2025

No.	Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
1	Barang Konsumsi	489.000	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
Total		489.000	0

Semua persediaan pada saat tanggal pelaporan dalam kondisi baik sebagaimana terdapat dalam opname fisik nomor 07/SEKPMW1-Mil04/PL1/VI/2026 tanggal 30 Juni

2026.

Saldo awal	:	0
Pembelian	:	8.022.000
Pemakaian	:	7.533.000
Sisa akhir	:	489.000

C.1.4. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan yang belum diregister merupakan persediaan yang sudah dibeli dan dicatat di aplikasi persediaan tetapi belum dipertanggungjawabkan pada Bendahara Pengeluaran Semester I TA. 2026.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Nilai Aset Tetap Semester I TA. 2026 dan 2025 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Semester I TA. 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	2025	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0
Nilai Buku Aset Tetap		0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.						
2.						
Jumlah		-	-	-	-	-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo Semester I TA. 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi nilai tim penertiban aset	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo Semester I TA. 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Semester I TA. 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Semester I TA. 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	

Transfer Keluar	0
Saldo Semester I TA. 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan :
Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I TA. 2026 dan 2025 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Semester I TA. 2025 dan 30 Juni 2026 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak

mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Semester I TA. 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 0*

Saldo aset lain-lain Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer I-05 Palembang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Semester I TA. 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :
Rp. 7.740.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.740.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer I-05 Palembang Semester I TA. 2026 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Semester I TA. 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
Utang Yang Belum Ditagihkan	1.740.000	0
Uang Muka dari KPPN	6.000.000	0
Jumlah	7.740.000	0

C.5.1. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp 1.740.000

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.740.000 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG per tanggal 30 Juni 2026 pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang Yang Belum Ditagihkan	Rp 1.740.000	
	Jumlah	Rp 1.740.000	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp.6.000.000,-

Saldo Uang Muka dari KPPN Semester I TA. 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.000.000,- dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar: Rp.

Beban yang Masih Harus Dibayar Semester I TA. 2026 dan 2025 sebesar Rp.0 dan Rp.0. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Semester I TA. 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
	NIHIL	
Jumlah		

C.7. Ekuitas

Ekuitas: Ekuitas Semester I TA. 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.(1.251.000),- dan Rp.0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP Semester I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
		0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pegawai	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	0	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 21.516.900*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.516.900,- dan Rp. 13.804.500,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	SEMESTER I TA. 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	21.516.900	13.804.500	7.712.400	55,87
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	21.516.900	13.804.500	7.712.400	55,87

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
120.679.900*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 120.679.900,- dan Rp. 110.415.925,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0	0
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	10.853.000	9.374.800	1.478.200	15,77
Beban Bahan	13.370.000	19.081.000	(5.711.000)	(29,93)
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	300.000	700.000	(400.000)	(57,14)
Beban Perjalanan Biasa	74.640.000	67.455.625	7.184.375	10,65
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	0
Beban Persediaan Konsumsi	21.516.900	13.804.500	7.712.400	55,87
Beban Langganan Air	0	0	0	0
Total Beban Barang Jasa	120.679.900	110.415.925	10.263.075	9,29

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
74.640.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 74.640.000,- dan Rp. 67.455.625,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	74.640.000	67.455.625	7.184.375	10,65
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Pengembalian belanja	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	74.640.000	68.573.213	7.184.375	10,65

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi :
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih :
Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	SEMESTER I TA. 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	SEMESTER I TA. 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional :
Rp. 0,-

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa :
Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember SEMESTER I TA. 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 287.000,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. (120.679.900) dan Rp. (110.415.925). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Software	0
Jumlah	0

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni SEMESTER I TA. 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.119.428.900,- dan Rp. 108.309.425,-. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni SEMESTER I TA. 2026
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	119.428.900
Transfer keluar	0
Transfer masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	119.428.900

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0 terdiri dari:

Nama satker	Transfer keluar	Transfer masuk
Pengadilan Militer I-05 Palembang	0	0
Jumlah	0	0

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Total Pengesahan		0
Pengesahan Pengembalian Hibah		0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. (1.251.000),- dan Rp. (1.819.500),-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun Semester lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening BRI Cabang A Rivai Palembang A/C 005901-001-399302 a.n. BPg 014 Dilmil I-05 Palembang 01 yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Peradilan Militer dan TUN.

F.2.3. Revisi DIPA

Sampai periode 30 Juni 2025 PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG melakukan revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : revisi pertama tanggal 25 Desember 2025, revisi kedua 13 Februari 2026, dan revisi ketiga 15 April 2026.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per tanggal 30 Juni 2026 tidak terdapat ralat SPM .

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 pada Pengadilan Militer I-05 Palembang terdapat Alokasi Anggaran Rp. 151.000.000,- dengan target 15 penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan. Pada kegiatan ini persidangan dilakukan di wilayah Provinsi Lampung dan Jambi dan sampai dengan Semester I telah terealisasi 8 penyelesaian perkara dengan reasiasi anggaran sebesar Rp. 64.660.000 dengan rincian sebagaimana terlampir.

DRAFT

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (663212) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	21,516,900	13,804,500	7,712,400	55.869
Beban Barang dan Jasa	24,523,000	29,155,800	(4,632,800)	(15.89)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	74,640,000	67,455,625	7,184,375	10.651
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (663212) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	120,679,900	110,415,925	10,263,975	9.296
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(120,679,900)	(110,415,925)	(10,263,975)	9.296
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(120,679,900)	(110,415,925)	(10,263,975)	9.296
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(120,679,900)	(110,415,925)	(10,263,975)	9.296

Keterangan :
FINAL

Palembang, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Supriadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950303390275

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663212) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	287,000	(287,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(120,679,900)	(110,415,925)	(10,263,975)	9.3
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	119,428,900	108,309,425	11,119,475	10.27
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,251,000)	(2,106,500)	855,500	(40.61)
EKUITAS AKHIR	(1,251,000)	(1,819,500)	568,500	(31.24)

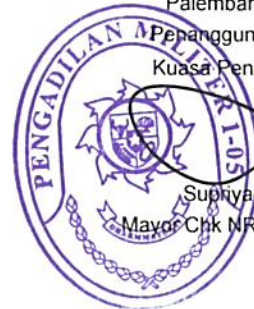
Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026

Pepangggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor CkK NRP 21950303390275

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG 663212

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	251,288,000	105,445,000	(145,843,000)	42	276,470,000	108,309,425	168,160,575	39
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	251,288,000	105,445,000	(145,843,000)	42	276,470,000	108,309,425	168,160,575	39
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG 663212

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	251,288,000	105,445,000	(145,843,000)	42	276,470,000	108,309,425	168,160,575	39
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
Palembang, 21 Juli 2026

Sepriyadi, S.H., M.H.
Mayor Cih/NRP 21950303390275
Kuasab Pengguna Anggaran
PENGADILAN MILITER I-05

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663212) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	0	6,000,000	0.00
Persediaan	489,000	0	489,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	6,489,000	0	6,489,000	
JUMLAH ASET	6,489,000	0	6,489,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Yang Belum Ditagihkan	1,740,000	0	1,740,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	6,000,000	0	6,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,740,000	0	7,740,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	7,740,000	0	7,740,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(1,251,000)	0	(1,251,000)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(1,251,000)	0	(1,251,000)	()
JUMLAH EKUITAS	(1,251,000)	0	(1,251,000)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,489,000	0	6,489,000	

Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Supriyadi, S.H., M.H.
 Mayor Chk NRP 21950303390275

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663212) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	489,000	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,740,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	6,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	105,445,000
0.0	313221	Transfer Masuk	0	13,983,900
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,853,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,370,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	74,640,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	21,516,900	0
JUMLAH			127,168,900	127,168,900

Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Supriyadi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950303390275



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (663212) PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 3:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	105,445,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,853,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	11,630,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,022,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74,640,000	0
JUMLAH			105,445,000	105,445,000

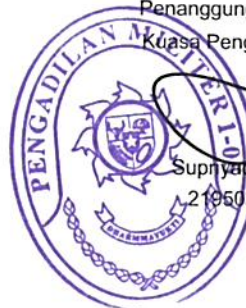
Keterangan :

FINAL

Palembang, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Supriyadi, S.H., M.H.

21950303390275

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I	: 05	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	Tanggal : 21/07/26 3:34 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 1100	SUMATERA SELATAN	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 663212	PENGADILAN MILITER 1-05 PALEMBANG	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 21/7/26 12:51 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.500.000	25.830.000	10.853.000	0	10.853.000	42.02	14.977.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	31.500.000	25.830.000	10.853.000	0	10.853.000	42.02	14.977.000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	44.000.000	37.018.000	11.630.000	0	11.630.000	31.42	25.388.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	44.000.000	37.018.000	11.630.000	0	11.630.000	31.42	25.388.000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24.050.000	19.240.000	8.022.000	0	8.022.000	41.69	11.218.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	24.050.000	19.240.000	8.022.000	0	8.022.000	41.69	11.218.000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.200.000	1.200.000	300.000	0	300.000	25	900.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4.800.000	4.800.000	300.000	0	300.000	6.25	4.500.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.360.000	160.080.000	74.640.000	0	74.640.000	46.63	85.440.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	4.320.000	0	0	0	0	4.320.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	175.760.000	164.400.000	74.640.000	0	74.640.000	45.4	89.760.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	280.110.000	251.288.000	105.445.000	0	105.445.000	41.96	145.843.000
	JUMLAH BELANJA	280.110.000	251.288.000	105.445.000	0	105.445.000	41.96	145.843.000

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor :07/SEKPMW1-Mil04/PL1/VI/2026

Nama Satker : Pengadilan Militer I-04 Palembang
Kode Satker : 663212
UAPPB-W : (1100) Sumatera Selatan
UAPPB-EI : (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
UAPB : 005.05.1100.526751.000.KD

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

3. Nama : M. Nasir, S.H
NIP : 198205132006041004
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Keuangan
4. Nama : Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md
NIP : 200003312025062019
Jabatan : Staf Pengelola Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semesteran Tahun 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

3. M. Nasir S.H.


.....

4. Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md


.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer I-04 Palembang




Supriyadi, S.N., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

HASIL OPNAME FISK

Nama Satker : Pengadilan Militer I-04 Palembang
Kode Satker : 663212
UAPPB-W : (1100) Sumatera Selatan
UAPPB-EI : (01) Badan Usaha Administrasi
UAPB : 005.01.1100.098938.000.KD

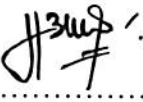
No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Rupiah
1	Kertas Folio	3	RIM	61.000	183.000
2	Kertas A4	3	RIM	54.000	162.000
3	Kertas HHI	3	RIM	48.000	144.000
Jumlah					489.000

Tim Pelaksana Opname Fisik:

3. M. Nasir S.H.


.....

4. Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md


.....

- c. Barang Persediaan dengan kondisi rusak sebanyak Nihil
- d. Barang Persediaan dengan kondisi usang sebanyak Nihil

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer I-04 Palembang


Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

LAPORAN KINERJA 2026

Periode Juni 2026

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 00505 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA 663212 PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tanggal 27-07-2026
Hal 1 dari 1

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
KODE FUNGSI 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
KODE SUB FUNGSI 03.04 PERADILAN								
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	251,288,000	105,445,000	42 %	—	—	—	—
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	251,288,000	105,445,000	42 %	—	—	—	—
AEA	Koordinasi	10,280,000	10,280,000	100 %	—	—	—	—
003	Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer	10,280,000	10,280,000	100 %	2	2	100 %	kegiatan
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	90,008,000	30,505,000	33.9 %	—	—	—	—
U03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua	89,550,000	30,505,000	34.1 %	120	28	23.3 %	Perkara
U05	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer	458,000	0	0 %	10	1	10 %	Perkara
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	151,000,000	64,660,000	42.8 %	—	—	—	—
001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	151,000,000	64,660,000	42.8 %	15	8	53.3 %	Perkara

LAPORAN KINERJA 2026

Periode Juni 2026

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 00505 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
SATUAN KERJA 663212 PENGADILAN MILITER I-05 PALEMBANG

Tanggal 27-07-2026
Hal 1 dari 1

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
KODE PN 01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia								
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	151,000,000	64,660,000	42.8 %	—	—	—	—
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	151,000,000	64,660,000	42.8 %	—	—	—	—
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	151,000,000	64,660,000	42.8 %	—	—	—	—
001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	151,000,000	64,660,000	42.8 %	15	8	53.3 %	Perkara